

ABSTRACT

The aims of this research is to explain and analyse communication constitutes organising of The Honor Board of Election Organiser (DKPP) which can create an integrity election organiser. Set of the problem focused on three aspects. Firstly, do what DKPP problems to reduce of obscurity and ambiguity as the first of ethic code election judicature organiser in Indonesia. Secondly, how to process of communication constitutes organising DKPP to bring into reality of integrity election organiser. Thirdly, answer the question about why communication constitutes organising of DKPP which was created integrity election organiser.

This research is using case study method as a result to this that the first DKPP is a role model profession of ethic code judicature, it was pursue a credibility from public. Information processed by DKPP with the enactment steps, selections, and retention organiser when they work is showing integrity as innovation development like an open meeting. It was different from another ethic code of upholder organisation which is still closed when take an inspection with the result that is only (proforma).

Secondly, effective communication is shaping DKPP as ethic code judicature. First, communication among of members when they arrange of membership formation and supporter staff which is doing assignment and function. Second, communication to another components such as State Ministry for The Empowerment of State Apparatus (Kemenpan RB) is not only to arrange structure of DKPP but also created a regulation within to shape team of investigator area. Third, communication with the principal colleagues are General Election Commission (KPU) and Supervisory Board Election (Bawaslu) to legal of ethic code which was arranged by them. Fourth, communication related to work division among of DKPP members.

Keywords: Organisation communication, communication constitutive organisation, DKPP, ethic code judicature, integrity election organiser



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengurai *communication constitutes organizing* DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Permasalahan difokuskan pada tiga hal, pertama persoalan apa yang dilakukan DKPP untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu pertama di Indonesia. Kedua, bagaimana proses *communication constitutes organizing* DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah menjawab mengapa *communication constitutes organizing* DKPP dapat mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang hasilnya adalah pertama, DKPP merupakan *role model* peradilan kode etik profesi yang telah mendapat kepercayaan publik. Proses informasi yang dilakukan DKPP dengan tahapan enachment, seleksi dan retensi telah menjadikan DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang dalam bekerja menunjukkan integritasnya dengan inovasi yang dibangun yakni sidang terbuka. Ini yang kemudian membendakannya dengan lembaga penegak kode etik lainnya yang masih tertutup dalam pemeriksaannya sehingga masih sebatas proforma.

Kedua, Komunikasi efektif dalam membentuk DKPP sebagai peradilan kode etik. Pertama, komunikasi diantara sesama anggota dalam menyusun formasi keanggotaan juga tenaga pendukung dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kedua, komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait yakni Sekjen Bawaslu RI, Kemenpan RB dalam menyusun struktur sekretariat DKPP juga pembuat undang-undang dalam membentuk Tim Pemeriksa Daerah. Ketiga, komunikasi dengan mitra utama yakni KPU dan Bawaslu untuk melegalkan kode etik yang disusunnya. Keempat komunikasi dalam pembagian kerja diantara anggota DKPP.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, *Communication Constitutive Organization*, DKPP, Peradilan Kode Etik, Penyelenggara Pemilu Berintegritas